

PROFESIONALISME GURU DAN TANTANGAN KEDEPAN DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA ERA GLOBAL

Aziz Shofi Nurdiansyah

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Kota Malang Jawa Timur
E-mail: azizshofi@yahoo.co.id

Abstrak: Profesionalisme merupakan *performance quality* dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme. Guru adalah pekerja profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Profesionalisme guru menghadapi problematika pendidikan yang masih banyak terjadi di negeri ini seperti, sistem yang berubah-ubah dan SDM yang masih kalah dengan negara-negara tetangga. Tantangan profesionalisme guru kedepan adalah perkembangan teknologi informasi, desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, dan pasar bebas ASEAN.

Kata Kunci: profesionalisme, guru, mutu pendidikan

Abstract: Professionalism is the performance quality and as well as the demands of professional conduct in performing their duties. Teacher professionalism are professional workers therefore uphold professionalism. The common understanding of professionalism demonstrated by trained hard work without any specific requirements. Teacher professionalism deal with education problem is still a lot going on in this country, such as changing the system and human resources is still inferior to neighboring countries. Teacher professionalism challenge in the future is the development of information technology, decentralization and centralization of education, and the ASEAN free market.

Keywords: professionalism, teachers, the quality of education

Pendidikan adalah tonggak perkembangan sebuah bangsa, melalui pendidikan yang berkualitas tentu berkorelasi dengan daya saing sebuah bangsa. Salah satu elemen penting dalam pendidikan adalah ketersediaan tenaga guru. Sebagai bagian dari elemen penting dalam dunia pendidikan, profesionalitas peran guru dalam proses pembelajaran, pengajaran dan pendidikan memiliki pertalian dengan peningkatan mutu pendidikan. Menanggapi kondisi tersebut, telah ditempuh berbagai upaya pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya di Indonesia terus dilakukan. Akibatnya muncul beberapa peraturan pendidikan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini. Termasuk memberlakukannya UU No

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU No 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen.

Disisi lain, tantangan datang dari perspektif bahwa kualitas pendidikan menjadi tuntutan global untuk kemudian menyiapkan sumberdaya yang dapat bersaing dengan dunia global. Tanggung jawab dan peran seorang pendidik amatlah berat dan tidak semudah apa yang diucapkan, sebab pendidik adalah kader-kader bangsa yang serba unik dan kompleks dan seorang pendidik harus siap dalam menghadapi perubahan dalam pendidikan di masa depan. Pentingnya proses belajar mengajar dalam kelas ditengarai sangat ditentukan oleh bagaimana seorang guru bersikap didalam kelas. Begitu pentingnya pola mengajar bagi seorang guru ini seringkali disebutkan secara khusus dalam kebijakan-kebijakan pendidikan kontemporer di Indonesia yang terkait dengan beban kerja guru yang selama ini kita kenal. Karena itu, tulisan sederhana ini ingin memberikan eksplorasi mengenai profesionalisme guru dan tantangan kedepan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Tulisan singkat ini berusaha mengkaji peran dan kompetensi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di era global. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya pendidik yang berkualitas dalam rangka menyongsong era kedepan yang semakin ketat, dalam hal ini pendidik yang merupakan *agent* pengajaran, bagaimana pendidik mampu dan bisa bukan hanya fasilitator akan tetapi juga sebagai panutan untuk peserta didiknya. Selain itu juga pendidik sebagai abdi negara dituntut juga harus mampu menjadi abdi yang baik bagi negara, segala aturan dan tuntutan dari pemerintah hendaknya mampu terakomodir dengan baik oleh setiap pendidik. Dengan begitu pendidik akan menjadi baik dari segi tugas mengabdinya kepada peserta didik dan baik juga sebagai abdi pemerintah, sehingga apapun tantangan yang akan ada di depan apabila kedua aspek tersebut berjalan beriringan pada setiap pendidik, profesionalisme pendidik akan mampu terwujud. Melalui tulisan ini akan sedikit dikupas mengenai profesionalisme guru dan tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh guru.

PEMBAHASAN

Problematika Mutu Pendidikan

Sebelum melangkah lebih jauh dalam mengkaji peran guru dalam peningkatan mutu pendidikan, ada baiknya melihat problematika mutu pendidikan saat ini. Hal ini sebagai overview untuk kemudian mengantarkan pada

pemahaman di mana dan seperti apa sebenarnya kompetensi dan profesionalitas guru secara ideal, seperti halnya juga yang dicantumkan dalam pengaturan Undang-undang guru dan dosen saat ini.

Pendidikan merupakan salah satu subsistem yang sentral, sehingga senantiasa perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan dalam menjaga kontinuitas proses kehidupannya dalam berbagai aspek di tengah-tengah masyarakat, negara-negara tersebut (input-proses-output). Karena itu, mutu pendidikan perlu menjadi perhatian berbagai pihak untuk kemudian mampu bersama memajukannya. Perlu diingat kita bahwa mutu pendidikan Indonesia belum beranjak dari prestasinya yang cukup rendah bahkan ditingkatkan ASIA.

Memang ada paradigma yang terbangun di dalam sistem pendidikan kita bahwa ganti menteri ganti kurikulum dan kebijakan pendidikan. Hal ini tentu dapat berpengaruh pada upaya sinkronisasi peningkatan mutu pendidikan. Dalam upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional ternyata memerlukan adanya perbaikan pula dalam aspek sistemik (regulasi-regulasi) serta meningkatnya kontrol sosial dari masyarakat, selain itu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan membutuhkan rasa aman (Malik Fadjar, 2001).

Hasil survey *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke 12, setingkat di bawah Vietnam. Sedangkan laporan dari United Nations Development Program (UNDP) tahun 2010 dan 2011, menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia ternyata tetap buruk. Tahun 2010 Indonesia menempati urutan ke 111 dari 175 negara ditambah. Lebih sempit lagi pada kawasan ASEAN, menurut UNDP menyatakan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN masih tertinggal cukup jauh, Singapura pada urutan 25, Brunei pada urutan 33, Malaysia pada urutan 58, sementara Indonesia berada pada urutan 111.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhinya. Landasan

Pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dalam berkaitannya dengan dunia pendidikan.

Untuk diyakini bahwa dalam bidang pendidikan, yang dimaksud dengan mutu memiliki pengertian sesuai dengan makna yang terkandung dalam siklus pembelajaran. Secara ringkas dapat diartikan beberapa kata kunci mengenai pengertian mutu, yaitu sesuai perkembangan kebutuhan, sesuai penggunaan pelanggan, sesuai perkembangan kebutuhan, dan sesuai kebutuhan lingkungan global Ibrahim (2000:6). Sehingga untuk melihat hasil dari mutu pendidikan yang tak biasa lepas dari hal tersebut adalah ketersediaan profesional guru dan aturan yang mengatur kerja guru, yang saling bersinergi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang baik.

Profesionalisme Guru

Supriyadi (1999) mengatakan bahwa bahwa profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai profesi, ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesi.

Dengan demikian profesionalisme merupakan *performance quality* dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya guru sebagai profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor profesionalisme. Guru adalah pekerja profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu. Pemahaman secara scientific profesionalisme menunjuk pada ide, aliran, atau pendapat bahwa suatu profesi harus dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu kepada profesionalisme (Wirawan: 2003).

Berbicara tentang profesionalisme guru tentunya berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru sebagai tenaga pendidik. Yang harus memiliki kemampuan pedagogic, emosional, serta kemampuan sosial guru juga diharapkan mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional. Seperti yang teramanat pada UU No 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbunyi : “guru merupakan bagian dari sebuah profesi dan dituntut untuk dapat profesional”. Kompeten berada di dalam diri seseorang berupa kemampuan atau kecakapan untuk melakukan sesuatu, yang berkaitan dengan pola-pola perilaku yang dapat diamati Harris dalam Mantja (2007:219).

Tuntutan keprofesionalan suatu pekerjaan pada dasarnya melukiskan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang memangku jabatan tersebut. Howsam dalam Mantja (2007:219) mengidentifikasi suatu profesi sebagai berikut: (1) Seseorang professional menggunakan waktu sepenuhnya untuk menjalankan pekerjaannya; (2) Terikat dengan panggilan hidup dan di dalam hal tersebut memerlukan seperangkat norma kepatuhan dan perilaku; (3) Menjadi anggota professional yang formal; (4) Menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar spesialisasi atau pendidikan yang sangat khusus; (5) Terikat oleh syarat-syarat kompetensi, kesadaran prestasi dan pengabdian; dan (6) Memperoleh otonomi berdasarkan spesialisasi teknik yang tinggi.

Kemampuan professional pendidik amatlah penting dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan. Beberapa hasil penelitian tentang peran dan kompetensi guru menyebutkan bahwa guru sekolah dasar yang progresif atau tradisionalnya membawa sedikit keberhasilan prestasi belajar Bennet dalam Mujis (2008:2). Kemampuan pendidik dalam meningkatkan profesionalnya tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Seperti yang dikenal saat ini bahwa, keprofesionalan seorang guru dibuktikan dengan sertifikat profesi (sertifikasi). Melalui sertifikat tersebut pula, guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditujukan untuk terus meningkatkan profesionalismenya. Untuk menanggapi hal tersebut, diberlakukanlah sejumlah UU dan PP dalam pengaturan profesionalisme seorang guru dan dosen.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal tersebut sebagai penterjemahan Pasal '42 UU RI Tahun 2003 yang menjelaskan syarat bagi pendidik yang harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sementara itu menurut Mantja (2007:218) kualifikasi guru yang diperlukan dalam satu era pembangunan adalah mereka yang mampu dan siap berperan secara professional dalam dua lingkungan besar, yaitu sekolah dan masyarakat.

Tantangan Profesionisme Guru: Perkembangan Teknologi Informasi

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadinya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat. Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dengan dukungan berbagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan.

Perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) menyebabkan peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Peran guru juga tidak akan menjadi satu-satunya sumber belajar karena banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar.

Teknologi mempunyai gagasan mereformasi sistem pendidikan masa depan. Apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri, mencipta, dan menjalani kehidupannya dengan berani dan percaya diri atas fasilitas lingkungannya (keluarga dan masyarakat) serta peran sekolah tidak hanya menekankan untuk mendapatkan nilai-nilai ujian yang baik saja, maka akan jauh lebih baik dapat menghasilkan generasi masa depan. Orientasi pendidikan yang terlupakan adalah bagaimana agar lulusan suatu sekolah dapat cukup pengetahuannya dan kompeten dalam bidangnya, tapi juga matang dan sehat kepribadiannya. Bahkan konsep tentang sekolah di masa yang akan datang, menurutnya akan berubah secara drastis.

Ada sisi-sisi tertentu dari fungsi dan peranan sekolah yang tidak dapat tergantikan, misalnya hubungan guru-murid dalam fungsi mengembangkan kepribadian atau membina hubungan sosial, rasa kebersamaan, kohesi sosial, dan lain-lain. Teknologi informasi hanya mungkin menjadi pengganti fungsi penyebaran informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar. Bahan ajar yang semula disampaikan di sekolah secara klasikal, lalu dapat diubah menjadi pembelajaran yang diindividualisasikan melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh siapapun dari manapun secara individu. Inilah tantangan profesi guru. Apakah perannya akan

digantikan oleh teknologi informasi, atau guru yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang peran profesinya.

Melalui penerapan dan pemilihan teknologi informasi yang tepat (sebagai bagian dari teknologi pendidikan), maka perbaikan mutu yang berkelanjutan dapat diharapkan. Perbaikan yang berlangsung terus menerus secara konsisten/konstan akan mendorong orientasi pada perubahan untuk memperbaiki secara terus menerus dunia pendidikan. Adanya revolusi informasi dapat menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik bila lembaga pendidikan mampu menyikapi dengan penuh keterbukaan dan berusaha memilih jenis teknologi informasi yang tepat, sebagai penunjang pencapaian mutu pendidikan. Pemilihan jenis media sebagai bentuk aplikasi teknologi dalam pendidikan harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak diundangkan UU No.22/1999 tentang Pemerintah Daerah maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan (termasuk dalam pengembangan pendidikan) harus ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya.

Bergesernya paradigma pembangunan yang sentralistik ke desentralistik telah mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bukan semata kepentingan negara. Pembangunan seharusnya mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya dalam arti yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapinya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Belajar dari pengalaman bahwa ketika peran pemerintah sangat dominan dan peranserta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan dari proses pembangunan itu sendiri. Penguatan partisipasi masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda pembangunan itu sendiri, lebih-lebih dalam era globalisasi. Peran serta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak daripada sekadar kewajiban. Kontrol rakyat (anggota masyarakat) terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol agenda dan urutan prioritas pembangunan bagi dirinya atau kelompoknya. Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah pusat lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar (menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional), sementara kebijaksanaan operasional yang menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah.

Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah, ada bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu: (1) Substansi pendidikan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah, seperti PKN, Sejarah Nasional, Pendidikan Agama, dan Bahasa Indonesia; (2) Pengendalian mutu pendidikan, berdasarkan standar kompetensi minimum; (3) Kandungan minimal kompeteten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar; (4) Standar- standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. Dengan berbagai hal diatas tentunya sistem desentralisasi merupakan suatu gagasan yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Dalam berbagai kasus mungkin bisa diterapkan akan tetapi belum tentu di kasus lain serupa bahkan akan memperumit kasus tersebut.

Dunia Pendidikan Indonesia Menghadapi MEA

Pada tahun 2015 kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya. Tak terkecuali “pendidikan” sebagai modal membangun sumber daya manusia yang kompetitif. Era perdagangan bebas ASEAN, harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat, agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain..

Mengacu pada faktor penentu kemajuan suatu negara yaitu, penguasaan inovasi (45%), penguasaan jaringan/networking (25%), penguasaan teknologi (20%), serta

kekayaan sumberdaya alam hanya (10%), maka pendidikan di Indonesia harus lebih menekankan pada tiga kemampuan tersebut untuk meningkatkan kemajuan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, dan sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut harus benar-benar mampu membekali kompetensi untuk berinovasi dan untuk membangun jaringan/networking. Kompetensi berinovasi dapat dilakukan dengan peningkatan berbagai ketrampilan yang ada. Ketrampilan ini bisa diupayakan dengan cepat karena siswa akan diajarkan bagaimana cara bekerja yang kreatif dan inovatif. Sedangkan kompetensi membangun jaringan dilakukan dengan pengembangan sikap dan mengelola sumber daya manusia seperti, kepemimpinan, kerja sama serta komunikasi.

Disamping itu peningkatan peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai disertai dengan pengawasan pelaksanaan anggaran, agar dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Seperti program pembangunan infrastruktur sekolah yang merata, menyusun kurikulum yang lebih representatif agar dapat menggali potensi siswa (tidak sekedar hardskill, namun juga softskill).

Pemerintah juga harus lebih memperhatikan kualitas, distribusi serta kesejahteraan guru di Indonesia, karena guru merupakan salah satu tonggak untuk mendukung jalannya pendidikan, dan sangat berperan penting dalam menciptakan siswa yang cerdas, terampil, bermoral dan berpengetahuan luas. Sehingga sepantasnya pemerintah dapat membuat peraturan untuk menuju penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi MEA 2015

Solusi KeDepan

Penerapan profesionalisme tentunya bukan hanya tanggung jawab semata dari guru tersebut, akan tetapi semua elemen yang mendukung dalam tugas guru. Berbagai masalah

dalam mencapai profesionalisme guru kedepan sangatlah kompleks, dengan kondisi tersebut apabila tidak ada kesiapan secara baik akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sementara saat ini, negara-negara di sekitar Indonesia memendang peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kinerja guru sudah berkembang dengan pesat.

Perbaikan sumber daya dalam hal ini adalah guru merupakan prioritas, perbaikan dalam hal jangka panjang untuk menyiapkan kemampuan guru, misalnya dalam kemampuan penguasaan teknologi informasi. Penguasaan teknologi informasi saat ini merupakan hal yang sangat penting, melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini. Perkembangan tersebut tentunya berdampak pula pada dunia pendidikan, bagaimana pendidikan mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Hal tersebut akan terwujud apabila komponen-komponen di dalam pendidikan mampu beradaptasi pula.

Guru sebagai salah satu komponen pendidikan harus mampu beradaptasi juga, langkah awal yang harus dilakukan adalah menumbuhkan minat guru terhadap teknologi informasi melalui stimulus-stimulus yang mengharuskan guru berhubungan langsung dengan teknologi informasi. Sebagai contoh sekolah memberikan instruksi kepada guru agar setiap kegiatan pembelajaran menggunakan media teknologi. Dengan begitu secara terbiasa guru akan mudah menguasai teknologi informasi, tentunya juga harus didukung sarana yang memadai dari sekolah.

Pengembangan kemampuan guru dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang perlu disaiapkan adalah kepemimpinan, public speaking, penguasaan bahasa asing, dan jaringan. Apabila hal tersebut mampu dikuasai oleh guru, maka akan mudah guru untuk menghadapi MEA dan siap bersaing dengan SDM dari negara anggota MEA serta mempunyai profesionalisme yang baik dalam bekerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Problematika pendidikan Indonesia saat ini terletak pada sistem dan sumber daya manusia nya yang masih belum bisa bersinergi, sehingga aturan yang dibuat kadang kala tidak menyesuaikan kemampuan SDM yang di lapangan, begitupun sebaliknya SDM terkadang enggan untuk menuruti aturan yang berlaku. Masalah tersebut mempunyai

dampak yang sangat besar terhadap pendidikan, karena hubungannya langsung dengan bagaimana guru menjalankan kegiatannya dan mampu dikatakan profesional.

Profesionalisme merupakan *performance quality* dan sekaligus sebagai tuntutan perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsekuensinya guru sebagai profesional dituntut untuk bisa bekerja dalam koridor profesionalisme. Guru adalah pekerja profesi oleh karena itu harus menjunjung profesionalisme. Pengertian umum profesionalisme menunjukkan kerja keras secara terlatih tanpa adanya persyaratan tertentu.

Tantangan yang menghadang di depan dalam mewujudkan profesionalisme guru adalah bagaimana guru mampu menguasai teknologi dan informasi, desentralisasi dan sentralisasi dalam pendidikan sehingga terkadang membatasi gerak guru untuk mengeluarkan kemampuannya. Dan tantangan yang paling besar adalah adanya MEA yang mengharuskan SDM di Indonesia mampu bersaing dengan SDM dari luar yang akan masuk ke Indonesia.

Saran

Mewujudkan profesionalisme guru merupakan tugas setiap stakeholder pendidikan, baik dari jajaran pembuat keputusan sampai pelaksana keputusan. Sinergi semua lini harus dilakukan agar perbaikan mutu guru dalam berbagai kemampuan dapat terwujud. Melihat tantangan yang ada di depan yang sangat terjal, solusinya memang harus saling bahu-membahu dalam perbaikan profesionalisme guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Mantja, W. 2007. *Profesionalisasi Tenaga Kependidikan: manajemen pendidikan dan supervisi pengajaran*. Malang : Elang Mas.
- Supriyadi, D. 1999. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Syamsudin, A. 2006. *Profesi Keguruan*. Jakarta: UT
- Undang-undang No. 14 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta : Depdiknas
- Wirawan, 2003. *Kapita Selecta Teori Kepemimpinan: Pengantar Untuk Praktek dan Penelitian*. Jakarta. Yayasan Bangsa Indonesia dan Uhamka Press.

- Barlian, I. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Erlangga.
- Purwanto, M.N. 2012. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Thoha, M. 2002. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoretik, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yukl, G.A.,. 1998. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Alih Bahasa Yusuf Udaya. Jakarta: Prenhallindo.

- The Indonesian Experience*. Director of Regional Capacity Development. Ministry of Home Affairs and Regional Autonomy. Jakarta
- Trail, Kathleen. (2000). *Taking the Lead: The Role of the Principal in School Reform*. Journal Connection. Vol. 1. No. 4. October 2000.
- Usman, Syaikhu. (2001). *Indonesia's Decentralization Policy: Initials Experiences and Emerging Problems*. Paper presented to the Third EUROSEAS Conference. London.
- Vernez, G., Karam, R. Marshall, J. (2012). *Implementation of School-Based Management in Indonesia*. Santa Monica, CA: RAND.
- Volansky, Amy and Friedman, A. Isaac. (2003). *School-Based Management. An International Perspective*. Publication Department, Ministry of Education, Devora HaNiviah 2, Jerusalem, Israel
- Wohlstetter, Priscilla and Mohrman, Susan Albers. (1993). *School-Based Management: Strategies for Success*. Consortium for Policy Research in Education (CPRE). The U. S. Department of Education
- Wankhede GG and Anirb, Sengupta. (2005). *Village Education Committees in West Bengal, India: Planned Vision and Beyond*. International Journal of Educational Development, Vol.25(5), pp.569-79.
- World Bank. (2007). *What is School-Based Management?*. Washington, D.C

- Siddiq M. Djauhar, dkk. 2008. *Pengembangan Bahan Ajar*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Depdiknas.
- Sitepu, B.P. 2005. *Memilih Buku Pelajaran*. Jurnal Pendidikan Penabur 4.
- Suharyono & Amien, M. 2013. *Pengantar Filsafat Geografi*. Yogyakarta: Ombak.
- Sumarmi, dkk. 2001. *Pencitraan buku teks Geografi SMU Berdasarkan Kurikulum 1994*. Malang: Lemlit Universitas Negeri Malang.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Vanessa, G. 2013. *Pembuatan Ensiklopedia Hewan Punah dan terancam Punah Berbasis Web*. Vol 2. No. 2.
- Yani, A. 2009. *Pengembangan Materi dan Bahan Ajar Geografi*. Pelatihan Induksi *Lesson Study and Team Teaching* Bagi Guru Geografi SMA Kabupaten Bandung. MGMP Geografi Bandung.

- Schlosser, F.K. & McNaughton, R.B. 2009. Using the I-MARKOR scale to identify market-oriented individuals in the financial services sector. *Journal of Services Marketing*, 23 (4), 236-248. doi: <http://dx.doi.org/10.1108/08876040910965575>
- Sindonews.com. 2013, 24 September. Konflik di sekolah, 15 guru mundur. Diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/786637/22/konflik-di-sekolah-15-guru-mundur-1379994895>
- Sparks, D. 2013. Strong Teams, Strong Schools: Teacher-to-Teacher Collaboration Creates Synergy that Benefits Students. *Journal of Staff Development*, 34 (2), 28-30.
- West, D.J. 2012. *Managements Basic A to Z*. USA: iUniverse.

- Sinamo, J.H. 1998. Menciptakan Visi Inovatif (In Search and Powerful Vision).
Manajemen: Majalah Bagi Manajer, Agustus, nomor 120:4-9.
- Smith W.F. and Andrews, R.L. 1989. *Instructional Leadership: How Principals Make A Difference*. Washington: ASCD Publications.
- Ubben, G.C., & Hughes, L.W. 1992. *The Principal: Creative Leadership for Effective Schools*. Boston: Allyn and Bacon.

- Hariyanto. 2012. *Mengapa perlu adanya Pendidikan Karakter*. (Online) (<http://belajarpsikologi.com/mengapa-perlu-adanya-pendidikan-karakter/>) (diakses) tanggal 22 Februari 2016
- Indiarti, W. 2013. *Pengembangan Program Desa Wisata dan Ekowisata Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Lickona, T.1996. Eleven principles of effective character education. *Journal of Moral Education*, 25 (1), 93-100. (online) (http://www.character.org/uploads/PDFs/ElevenPrinciples_new2010.pdf.) diakses pada tanggal 22 Februari 2016
- Muhtadi, A. 2013. Implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. (online) (<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Implementasi%20Pendidikan%20karakter%20dalam%20kurikulum%20di%20sekolah.pdf>.) diakses pada tanggal 22 Februari 2016
- Ridwan, N. A. 2007. Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam dan Budaya*. Vol. 5, (1), 27-38 (online) (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=49104&val=3909>) diakses tanggal 22 Februari 2016
- Sartini. 2006. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah kajian Filsafat. (online) (<http://filsafat.ugm.ac.id>), diakses tanggal 22 Februari 2016.
- Sugiarto, Ryan. 2009. *55 Kebiasaan Kecil yang Menghancurkan Bangsa*. Yogyakarta: Pinus Book publishing
- Suyanto. 2009. Urgensi pendidikan karakter. (online) (<http://www.mendikdasmen.depdiknas.go.id/web/pages/urgensi.html>) diakses pada tanggal 22 Februari 2016
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional (Sisdiknas)
- Wagiran. 2011. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-Nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal pendidikan karakter*. 3 (1), 329-339
- Wahyuni, S. 2013. Keberagaman Dan Makna Nilai Kearifan Lokal Sebagai Sumber Inspirasi Pembelajaran Seni Budaya Yang Berkarakter. Ikip PGRI Madiun
- Williams, M., & Schnaps, E.1999 . *Character Education: The foundation for teacher education*. Washington DC: Character Education Partnership. (online) (<https://searchworks.stanford.edu/view/4495248>) diakses tanggal 22 Februari 2016

Terry, GeorgeR., 1980. *Principle og Management*. Homewood-Illonis: Richard D Irwin, Inc.

Sekolah ini menggunakan pendekatan islami dan ingin mengembangkan minat bakat sesuai usia peserta didik.

Taktik sekolah ini meliputi, diferensiasinya adalah media pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi dengan video yang dibuat khusus berdasarkan tema serta kegiatan edukatif lainnya. Lokasi yang luas dan nyaman, arena bermain indoor dan outdoor, fasilitas kolam renang dan lahan berkebun, dan penyampaian materi menggunakan LCD proyektor. Selain itu memberika pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat tetap percaya terhadap sekolah. Produk yang dihasilkan adalah output yang berkualitas dengan biaya murah kualitas output tinggi yang ditunjang dengan lokasi strategis dan teknik pemasarannya adalah dengan menggunakan website, brosur dan banner.

Saran

Pengelola bidang humas dapat selalu mempertahankan dan meningkatkan dalam memperbarui atau meng-*update* teknik pemasaran yang digunakan yakni *website* karena lebih mudah di akses di seluruh dunia sehingga sekolah jadi lebih dikenal di masyarakat luas. Teknik-teknik pemasaran dapat ditingkatkan dengan pengembangan teknik yang lain. mungkin tetap mempertahankan teknik yang ada namun “daya beda” harus lebih ditonjolkan oleh sekolah ini dibanding sekolah lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Firmanzah, 2008. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, Edisi Kedua, Yayasan. Obor Indonesia, Jakarta*
- Kertajaya, Hermawan. 2006. Seri 9 Hermawan Kertajaya on Marketing Mix. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka*
- Maisyaroh. 2004. Hubungan Masyarakat. Malang: Universitas Negeri Malang.*
- Syafaruddin. 2002. Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia.*
- Ulfatin, N. 2013. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan:Teori dan Aplikasinya. Malang: Bayumedia Publishing.*